



LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

Untuk Periode yang Berakhir
Tahun Anggaran 2021



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan KPKNL Jayapura mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Jayapura. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jayapura, Mei 2022
Kepala Kantor

Dadang Eko Darminto

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	44
Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA**

Jalan Kelapa Dua Raya, Komplek Papua Trade Centre (PTC) Entrop Jayapura, 99224
Telepon : 0967-534641 Faksimili : 0967-536827, Email kpknljayapura11@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode Triwulan III Tahun Anggaran (TA) 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, Mei 2022
Kepala Kantor

Dadang Eko Darminto

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 31 Desember 2021 dengan 30 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.455.471.182 atau mencapai 129% persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp4.989.911.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.834.129.246 atau mencapai 96% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.915.648.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun Anggaran 2021.

Nilai Aset per Tahun Anggaran 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.653.457.697 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp58.433.200 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp5.595.024.497.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp600.000 dan Rp5.652.857.697.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-

LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp6.444.893.282 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp1.783.515.205 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.661.378.077.

Pada Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(130.142.100) dan Rp0, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp4.531.235.977.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp5.742.963.656 ditambah Surplus-LO sebesar Rp4.531.235.977 kemudian dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(4.621.341.936), sehingga terdapat penurunan Ekuitas entitas pada tanggal Tahun Anggaran 2021 senilai Rp(90.105.959).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal Tahun Anggaran 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	4.989.911.000	6.455.471.182	129	3.148.177.399
JUMLAH PENDAPATAN		4.989.911.000	6.455.471.182	129	3.148.177.399
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-		1.148.302.806
Belanja Barang	B.4	1.550.648.000	1.469.129.246	95	1.453.087.647
Belanja Modal	B.5	365.000.000	365.000.000	100	394.747.660
Jumlah Belanja Operasi		1.915.648.000	1.834.129.246	96	2.996.138.113
JUMLAH BELANJA		1.915.648.000	1.834.129.246	96	2.996.138.113

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA NERACA

PER TAHUN ANGGARAN 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	600.000	45.694.200
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	57.833.200	36.327.800
Jumlah Aset Lancar		58.433.200	82.022.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	2.564.512.000	2.564.512.000
Peralatan dan Mesin	C.14	2.775.790.106	3.050.966.606
Gedung dan Bangunan	C.15	2.495.492.000	2.495.492.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	24.734.000	24.734.000
Aset Tetap Lainnya	C.17	2.000.000	2.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(2.267.503.609)	(2.434.661.869)
Jumlah Aset Tetap		5.595.024.497	5.703.042.737
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	90.900.000	700.561.312
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(90.900.000)	(696.968.193)
Jumlah Aset Lainnya		-	3.593.119
JUMLAH ASET		5.653.457.697,00	5.788.657.856
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	600.000	45.694.200
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		600.000	45.694.200
JUMLAH KEWAJIBAN		600.000	45.694.200
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	5.652.857.697	5.742.963.656
JUMLAH EKUITAS		5.652.857.697	5.742.963.656
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.653.457.697	5.788.657.856

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	TA 2021	TA 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	6.444.893.282	3.145.661.269
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		6.444.893.282	3.145.661.269
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	1.117.222.806
Beban Persediaan	D.3	112.971.600	98.596.700
Beban Barang dan Jasa	D.4	769.297.253	692.384.391
Beban Pemeliharaan	D.5	158.720.664	197.812.161
Beban Perjalanan Dinas	D.6	406.634.329	452.222.862
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	335.891.359	344.533.240
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		1.783.515.205	2.902.772.160
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		4.661.378.077	242.889.109
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset non lancar		(130.142.100)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		10.577.900	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		140.720.000	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	(994.800)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	475.400
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	(1.470.200)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(130.142.100)	(994.800)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		4.531.235.977	241.894.309
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		4.531.235.977	241.894.309

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
EKUITAS AWAL	E.1	5.742.963.656	5.500.206.495
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	4.531.235.977	241.894.309
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(4.621.341.936)	862.852
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(90.105.959)	242.757.161
EKUITAS AKHIR	E.7	5.652.857.697	5.742.963.656

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum, Profil dan Kebijakan Teknis Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tanggal 31 Desember 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KM.1/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akruwal Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Kantor Pelayanan.

Profil

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Jayapura Lantai 4, JL Ahmad Yani No.8, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura mempunyai tugas dan fungsi dalam memberi bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Rencana Strategis

Untuk mewujudkan tujuan di atas KPKNL Jayapura berkomitmen dengan visi ***“menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang terpercaya, akuntabel, dan terbaik di tingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.”*** Untuk

mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mewujudkan pelayanan yang baik secara efektif dan efisien kepada satuan kerja yang berada dalam wilayah kerja KPKNL Jayapura.
- Memberikan citra positif sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Papua.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau hal-hal lain terkait dengan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dengan demikian, hingga saat ini Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku membawahi 4 (empat) kantor vertikal di daerah, yaitu KPKNL Jayapura, KPKNL Biak, KPKNL Sorong, dan KPKNL Ambon.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang Jayapura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
 - Pendapatan Jasa Lainnya
 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
 - Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
 - Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan

- mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang

jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang

berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - d. Tanah
 - e. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - f. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPKNL Jayapura telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan, serta refocusing dan realokasi belanja Kementerian Keuangan TA 2021. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Anggaran pada DIPA

Uraian	2021	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.509.000.000	2.509.000.000
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara	12.911.000	12.911.000
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.468.000.000	2.468.000.000
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Penyetoran Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak		
Jumlah Pendapatan	4.989.911.000	4.989.911.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.854.418.000	1.550.648.000
Belanja Modal	400.718.000	365.000.000
Jumlah Belanja	2.255.136.000	1.915.648.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp6.455.471.182*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp6.455.471.182 atau mencapai 129% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.989.911.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura hanya terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-		-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.509.000.000	1.398.392.719	56
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	12.911.000	16.647.144	129
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	-	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	500.001	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.468.000.000	5.029.233.950	204
Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	10.577.900	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak Diambil oleh yang Berhak	-	119.468	-
Jumlah	4.989.911.000	6.455.471.182	129

Pada Tahun Anggaran 2021 realisasi pendapatan paling besar terdapat pada pendapatan bea lelang pegadaian sebesar Rp5.029.233.950. Realisasi pendapatan lainnya berasal dari pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I sebesar Rp1.398.392.719, pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar Rp16.647.144, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar 10.577.900, pendapatan jasa lainnya sebesar Rp500.001, dan pendapatan penyetoran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak sebesar Rp119.468.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp1.834.129.246*

B.2. Belanja

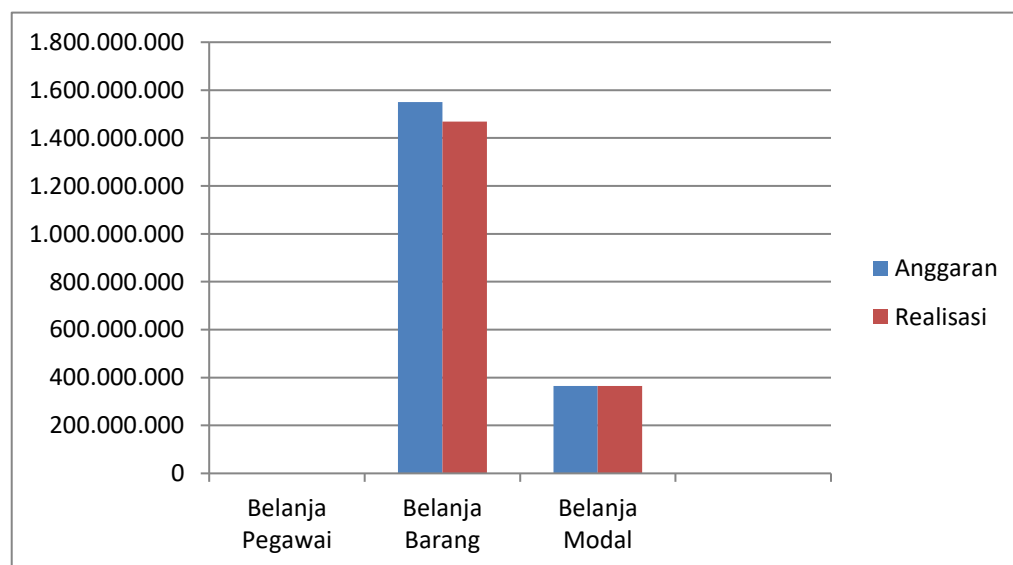
Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.834.129.246 atau 96 persen dari anggaran belanja setelah revisi yaitu sebesar Rp1.915.648.000. Rincian anggaran

dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Tahun Anggaran 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.550.648.000	1.469.129.246	95
Belanja Modal	365.000.000	365.000.000	100
Total Belanja Kotor	1.915.648.000	1.834.129.246	96
Pengembalian Belanja		-	
Jumlah	1.915.648.000	1.834.129.246	96

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp1.469.129.246 atau 95% dari pagu anggaran sebesar Rp1.550.648.000 dan Belanja Modal sebesar Rp365.000.000 atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp365.000.000. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya sentralisasi Belanja Pegawai sehingga jumlah realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 menjadi lebih rendah meskipun realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	1.148.032.806	(100,00)
Belanja Barang	1.469.129.246	1.453.087.647	1,10
Belanja Modal	365.000.000	394.747.660	(7,54)
Jumlah	1.834.129.246	2.995.868.113	(38,78)

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.148.032.806. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 100 persen dari Tahun Anggaran 2020, antara lain disebabkan karena adanya kebijakan sentralisasi Belanja Pegawai.

*Belanja Barang
Rp1.469.129.246*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.469.129.246 dan Rp1.453.087.647. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran

2021 mengalami kenaikan 1,1% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 sampai dengan tahun 2021 sudah lebih kondusif apabila dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 2.7 Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	655.658.329	590.656.913	11,00
Belanja Barang Non Operasional	15.909.700	59.176.200	(73,11)
Belanja Barang Persediaan	134.477.000	119.248.400	12,77
Belanja Jasa	97.729.224	33.971.111	187,68
Belanja Pemeliharaan	158.720.664	197.812.161	(19,76)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	406.634.329	452.222.862	(10,08)
Jumlah Belanja Kotor	1.469.129.246	1.453.087.647	1,10
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	1.469.129.246	1.453.087.647	1,10

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp365.000.000*

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada DIPA TA 2021 terdapat anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp365.000.000. Pada Tahun Anggaran 2021, telah terealisasi belanja modal tersebut dengan nominal total sebesar Rp365.000.000 atau mencapai 100 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	365.000.000	16.077.660	2.170
Jumlah Belanja Kotor	365.000.000	16.077.660	2.170
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	365.000.000	16.077.660	2.170

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rekening Virtual Account merupakan pengganti dari rekening BRI (0307-01-000108-30-1) karena telah dilakukan penutupan pada rekening tersebut.

Tabel 3.1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA 2021	TA 2020
Rekening Virtual Account (650095381291000)	-	-
Uang Tunai	-	-
Kwitansi UP belum di SPJ-kan	-	-
Pembulatan	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar masing-masing Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 3.2 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TA 2021	TA 2020
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp600.000*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp600.000 dan kas pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.694.200.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TA 2021	TA 2020
Uang Tunai	-	-
Biad PPN yang belum disetor ke Kas Negara	-	-
Dana Pihak Ketiga	600.000	45.694.200
Jumlah	600.000	45.694.200

*Piutang PNB
Rp0*

C.4 Piutang PNB

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada Tahun Anggaran 2021 tidak memiliki piutang PNB. Saldo Piutang PNB per tanggal Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Tabel 3.4 Rincian Piutang PNB

Uraian	TA 2021	TA 2020
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada Tahun Anggaran 2021 tidak

memiliki Bagian Lancar TP/TGR. Saldo Bagian Lancar TP/TGR per tanggal Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Bagian Lancar TPA
Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada Tahun Anggaran 2020 tidak memiliki Bagian Lancar TPA. Saldo Bagian Lancar TPA per tanggal Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2021 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Tabel 3.5 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp0 **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2021 tidak memiliki Belanja Dibayar di Muka. Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 3.6 Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TA 2021	TA 2020
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp.57.833.200 **C.9 Persediaan**

Nilai Persediaan per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing adalah sebesar Rp57.833.200 dan Rp.36.327.800 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2021	TA 2020
Barang Konsumsi	57.833.200	36.327.800
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
Jumlah	57.833.200	36.327.800

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2021 tidak memiliki Tagihan TP/TGR. Saldo Tagihan TP/TGR per tanggal Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2020 tidak memiliki TPA. Saldo TPA per tanggal Tahun Anggaran 2021 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2020 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal Tahun Anggaran 2021 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tabel 3.8 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp.2.564.512.000

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Jayapura per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.564.512.000. Rincian saldo Tanah per Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1000m2	Jalan Lembah Sunyi IV, Angkasapura, Jayapura Utara	2.564.512.000
Jumlah			2.564.512.000

Peralatan dan

Mesin

Rp2.775.790.106

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah Rp2.775.790.106 dan Rp3.050.966.606. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	3.050.966.606
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	3.050.966.606
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(275.176.500)
Nilai Buku Per 31 Desember 2021	2.775.790.106

*Gedung dan
Bangunan
Rp2.495.492.000*

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp2.495.492.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	2.495.492.000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2021	2.495.492.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2021	2.495.492.000

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp24.734.000*

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.734.000. Tidak ada mutasi transaksi pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap
Lainnya
Rp2.000.000

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah Rp2.000.000. Aset tetap tersebut berupa koleksi buku perpustakaan.

Tabel 3.13 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	2.000.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2021	2.000.000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.000.000

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0.

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Tahun Anggaran 2021 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0.

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2021 tidak memiliki Aset Tak Berwujud. Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(2.267.503.609)

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing (Rp2.267.503.609) dan (Rp2.434.661.869). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang

bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	2.564.512.000	-	2.564.512.000
2	Peralatan dan Mesin	3.050.966.606	2.045.538.520	1.005.428.086
3	Gedung dan Bangunan	2.495.492.000	219.036.066	2.276.455.934
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.734.000	2.929.023	21.804.977
5	Aset Tetap Lainnya	2.000.000	-	2.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.137.704.606	2.267.503.609	5.870.200.997

*Aset Lain-Lain
Rp90.900.000*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp90.900.000 dan Rp700.561.312. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(90.900.000)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 Rp(90.900.000) dan Rp(696.968.193). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja

dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp600.000*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp600.000 dan Rp45.694.200. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0*

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0. Utang yang Belum ditagihkan tersebut merupakan transaksi atas UP yang belum diajukan SPM GUP ke KPPN.

*Ekuitas
Rp5.742.963.656*

C.27 Ekuitas

Ekuitas per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.742.963.656 dan Rp5.500.206.495. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp6.444.893.282

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp6.444.893.282 dan Rp3.145.661.269. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 4.1 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6.444.893.282	3.145.661.269	104,88%
Jumlah	6.444.893.282	3.145.661.269	104,88%

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa PNBP Lainnya meliputi Pendapatan Bea Lelang, Pendapatan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak diambil oleh yang berhak, serta Pendapatan Anggaran Lain-Lain.

Beban Pegawai
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.117.222.806. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban

Persediaan

Rp112.971.600

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp112.971.600 dan Rp98.596.700. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	112.971.600	98.596.700	15%
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	112.971.600	98.596.700	14,58%

Untuk beban persediaan, pada laporan operasional nilai yang terealisasi tidak ada.

Beban Barang

dan Jasa

Rp769.297.253

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp769.297.253 dan Rp692.384.391. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dikarenakan pada periode sebelumnya yang terdampak oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan minimnya konsumsi barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020
Belanja Pengiriman Surat Dinas dan Pos	27.013.797	23.157.608
Belanja Honor Operasional Satker	140.880.000	167.520.000
Belanja Barang Operasional Lainnya	21.980.000	44.800.000
Belanja Bahan	15.909.700	51.676.200
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	6.283.130
Belanja Langganan Telepon	17.590.724	20.965.078
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	90.496.442	49.204.981
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	30.138.500	11.139.000
Belanja Keperluan Perkantoran	375.288.090	297.638.394
Belanja Non Operasional Lainnya	0	7.500.000
Belanja Sewa	50.000.000	12.500.000
Jumlah	769.297.253	692.384.391

Beban

Pemeliharaan

Rp158.720.664

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp158.720.664 dan Rp197.812.161. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan di Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan 20 persen karena adanya efisiensi pada beban pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.000.000	0	0,00%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.720.664	197.812.161	-23,30%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covis-19	0	0	
Jumlah	158.720.664	197.812.161	-20%

Beban Perjalanan
Dinas
Rp406.634.329

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp406.634.329 dan Rp452.222.862. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 10 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya efisiensi. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	359.876.329	390.702.862	-7,89%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.758.000	61.520.000	-24,00%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	-
Jumlah	406.634.329	452.222.862	-10%

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp335.891.359

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp335.891.359 dan Rp344.533.240. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	279.305.198	287.432.828	-2,83%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	53.402.148	53.402.148	0,00%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	650.894	650.894	0,00%
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	2.533.119	3.047.370	0,00%
Jumlah Penyusutan	335.891.359	344.533.240	-2,51%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	335.891.359	344.533.240	-3%

Surplus / Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp(130.142.100)

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	10.577.900	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar	140.720.000	0
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	345.000
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran yang Lalu		0
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu		0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	-1.470.200
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-130.142.100	-1.125.200

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.742.963.656.

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.742.963.656 dan Rp5.500.206.495.

Defisit LO
Rp4.531.235.977

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp4.531.235.977 dan Rp241.894.309. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian atas aset berupa persediaan yang disebabkan oleh perubahan harga perolehan persediaan. Penyesuaian Nilai Aset berupa persediaan untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap (Revaluasi BMN). Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 pada KPKNL Jayapura adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Rp0*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Serta koreksi karena adanya Reklasifikasi kode barang pada pencatatan di SIMAK-BMN. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Koreksi Lain-lain
Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp(4.621.341.936)*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(4.621.341.936) dan Rp862.852.

*Ekuitas Akhir
Rp5.652.857.697*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.652.857.697 dan Rp5.742.963.656.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pejabat Pengelola Keuangan pada tahun di Lingkup KPKNL Jayapura adalah sebagai berikut:

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Widiyantoro
Pejabat Pembuat Komitmen	: Deni Kurniawan
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Erwin I. Situmorang
Bendahara Pengeluaran	: Davis Arya Kameswara

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Widiyantoro
Pejabat Pembuat Komitmen	: Deni Kurniawan
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Kurniawan
Bendahara Pengeluaran	: Davis Arya Kameswara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA 538129

Kode Lap : LRA.F.S

Tanggal : 23/01/22 9:16 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	4,989,911,000	6,455,471,182	1,465,560,182	129	3,330,492,000	3,148,177,399	(182,314,601)	95
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	4,989,911,000	6,455,471,182	1,465,560,182	129	3,330,492,000	3,148,177,399	(182,314,601)	129
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	1,187,773,000	1,148,032,806	(39,740,194)	97
	BELANJA BARANG	1,550,648,000	1,469,129,246	(81,518,754)	95	1,745,496,000	1,453,087,647	(292,408,353)	83
	BELANJA MODAL	365,000,000	365,000,000	0	100	395,470,000	394,747,660	(722,340)	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,915,648,000	1,834,129,246	(81,518,754)	96	3,328,739,000	2,995,868,113	(332,870,887)	96
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 2500 PAPUA
SATUAN KERJA : 538129 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 23/01/22 9:17 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	10,577,900	0	10,577,900	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	10,577,900	0	10,577,900	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,001	0	500,001	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	500,001	0	500,001	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2,509,000,000	1,398,392,719	0	1,398,392,719	55.74
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2,468,000,000	5,029,233,950	0	5,029,233,950	203.78
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	12,911,000	16,647,144	0	16,647,144	128.94
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	4,989,911,000	6,444,273,813	0	6,444,273,813	129.15
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak	0	119,468	0	119,468	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	119,468	0	119,468	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	4,989,911,000	6,455,471,182	0	6,455,471,182	129.37
	JUMLAH PENDAPATAN	4,989,911,000	6,455,471,182	0	6,455,471,182	129.37

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 ESELON I : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 017
 SATUAN KERJA : 538129
 JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Kanwil DJKN Papua
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

Kode Lap : LRA.B.S.
 Tanggal : 23/01/22 9:17 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun --
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	350,867,000	382,670,000	375,288,090	0	375,288,090	98.07	7,381,910
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	60,000,000	29,650,000	27,013,797	0	27,013,797	91.11	2,636,203
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	140,880,000	140,880,000	140,880,000	0	140,880,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	57,100,000	22,000,000	21,980,000	0	21,980,000	99.91	20,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	132,442,000	93,242,000	90,496,442	0	90,496,442	97.06	2,745,558
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	741,289,000	668,442,000	655,658,329	0	655,658,329	98.09	12,783,671
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	118,372,000	16,823,000	15,909,700	0	15,909,700	94.57	913,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	118,372,000	16,823,000	15,909,700	0	15,909,700	94.57	913,300
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	175,000,000	134,500,000	134,477,000	0	134,477,000	99.98	23,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	175,000,000	134,500,000	134,477,000	0	134,477,000	99.98	23,000
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	30,000,000	19,800,000	17,590,724	0	17,590,724	88.84	2,209,276
522141	Belanja Sewa	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	72,600,000	48,937,000	30,138,500	0	30,138,500	61.59	18,798,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	152,600,000	118,737,000	97,729,224	0	97,729,224	82.31	21,007,776
5231	Belanja Pemeliharaan							
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	23,160,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	172,940,000	172,940,000	151,720,664	0	151,720,664	87.73	21,219,336
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	196,100,000	179,940,000	158,720,664	0	158,720,664	88.21	21,219,336
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	398,977,000	382,628,000	359,876,329	0	359,876,329	94.05	22,751,671
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72,080,000	49,578,000	46,758,000	0	46,758,000	94.31	2,820,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	471,057,000	432,206,000	406,634,329	0	406,634,329	94.08	25,571,671
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,854,418,000	1,550,648,000	1,469,129,246	0	1,469,129,246	94.74	81,518,754
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400,718,000	365,000,000	365,000,000	0	365,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	400,718,000	365,000,000	365,000,000	0	365,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	400,718,000	365,000,000	365,000,000	0	365,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	2,255,136,000	1,915,648,000	1,834,129,246	0	1,834,129,246	95.74	81,518,754

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KDUAPPAW : 01509017KD	Kanwil DJKN Papua
KODE SATKER : 538129	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

Tgl. Cetak 23/01/2022 9:16 PM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	600,000	45,694,200	(45,094,200)	(98.69)
Persediaan	57,833,200	36,327,800	21,505,400	59.20
JUMLAH ASET LANCAR	58,433,200	82,022,000	(23,588,800)	(28.76)
ASET TETAP				
Tanah	2,564,512,000	2,564,512,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,775,790,106	3,050,966,606	(275,176,500)	(9.02)
Gedung dan Bangunan	2,495,492,000	2,495,492,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,734,000	24,734,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,000,000	2,000,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,267,503,609)	(2,434,661,869)	167,158,260	(6.87)
JUMLAH ASET TETAP	5,595,024,497	5,703,042,737	(108,018,240)	(1.89)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	90,900,000	700,561,312	(609,661,312)	(87.02)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(90,900,000)	(696,968,193)	606,068,193	(86.96)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	3,593,119	(3,593,119)	(100.00)
JUMLAH ASET	5,653,457,697	5,788,657,856	(135,200,159)	(2.34)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	600,000	45,694,200	(45,094,200)	(98.69)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	600,000	45,694,200	(45,094,200)	(98.69)
JUMLAH KEWAJIBAN	600,000	45,694,200	(45,094,200)	(98.69)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,652,857,697	5,742,963,656	(90,105,959)	(1.57)
JUMLAH EKUITAS	5,652,857,697	5,742,963,656	(90,105,959)	(1.57)
JUMLAH EKUITAS	5,652,857,697	5,742,963,656	(90,105,959)	(1.57)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,653,457,697	5,788,657,856	(135,200,159)	(2.34)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 2500	PAPUA
SATUAN KERJA : 538129	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

Tgl. Cetak 23/01/2022 9:15 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	600,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	57,833,200	0
0.0	131111	Tanah	2,564,512,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,775,790,106	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,495,492,000	0
0.0	134112	Irigasi	24,734,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,000,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,045,538,520
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	219,036,066
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,929,023
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	90,900,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	90,900,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	600,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,834,129,246
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	6,455,471,182	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,742,963,656
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	10,577,900
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,001
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,398,392,719
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	5,029,233,950
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	16,647,144
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	119,468
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	375,288,090	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27,013,797	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	140,880,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	21,980,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	90,496,442	0
3.0	521211	Beban Bahan	15,909,700	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	17,590,724	0
3.0	522141	Beban Sewa	50,000,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	30,138,500	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	7,000,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 2500	PAPUA
SATUAN KERJA : 538129	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

Tgl. Cetak 23/01/2022 9:15 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151,720,664	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	359,876,329	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	46,758,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	279,305,198	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	53,402,148	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	650,894	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,533,119	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	112,971,600	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	140,720,000	0
JUMLAH			16,391,567,693	16,391,567,693

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 2500	PAPUA
SATUAN KERJA : 538129	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

Tgl. Cetak 23/01/2022 9:15 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	81,518,754	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	1,465,560,182	0
2.0	425782	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I Yang Dialokasikan	2,509,000,000	0
2.0	425784	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pegadaian Yang Dialokasikan	2,468,000,000	0
2.0	425785	Estimasi Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Yang Dialokasikan	12,911,000	0
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	382,670,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	29,650,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	140,880,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	22,000,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	93,242,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	16,823,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	134,500,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	19,800,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	50,000,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	48,937,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	7,000,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	172,940,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	382,628,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	49,578,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	365,000,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	10,577,900
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,001
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,398,392,719
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	5,029,233,950
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	16,647,144
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	119,468
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	375,288,090	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27,013,797	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	140,880,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	21,980,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	90,496,442	0
3.0	521211	Belanja Bahan	15,909,700	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	134,477,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	17,590,724	0
3.0	522141	Belanja Sewa	50,000,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	30,138,500	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 2500
SATUAN KERJA : 538129

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
PAPUA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

Tgl. Cetak 23/01/2022 9:15 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	7,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151,720,664	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	359,876,329	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46,758,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	365,000,000	0
JUMLAH			8,371,119,182	8,371,119,182

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 2500	PAPUA
SATUAN KERJA : 538129	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

Tgl. Cetak 15/05/2022 2:26 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	45,694,200	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	36,327,800	0
0.0	131111	Tanah	2,564,512,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,050,966,606	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,495,492,000	0
0.0	134112	Irigasi	24,734,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,000,000	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,266,749,822
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	165,633,918
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,278,129
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	700,561,312	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	696,968,193
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	45,694,200
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,995,868,113
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,148,177,399	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	153,172,138
0.0	391111	Ekuitas	0	5,500,206,495
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,484,400
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	838,834
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	59,354
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,325,527,160
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,801,873,428
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	7,658,090
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	3
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,220,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 2500	PAPUA
SATUAN KERJA : 538129	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

Tgl. Cetak 15/05/2022 2:26 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	475,400
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	749,202,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,338	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	84
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	44,611,250	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	11,387,082	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	43,560,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,328,900	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	32,661,420	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	114,588,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	85,925,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	33,945,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	297,638,394	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6,283,130	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23,157,608	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	167,520,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	44,800,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	49,204,981	0
3.0	521211	Beban Bahan	51,676,200	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	7,500,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	20,965,078	0
3.0	522141	Beban Sewa	12,500,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	11,139,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	197,812,161	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	390,702,862	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	61,520,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	287,432,828	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	53,402,148	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	650,894	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3,047,370	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	98,596,700	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1,470,200	0
JUMLAH			14,972,707,761	14,972,707,761

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 017	KANWIL XVII DJKN JAYAPURA	Tanggal : 23/01/22 9:16 PM
SATUAN KERJA	: 538129	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA	: KD	JAYAPURA	Prg ID : lap_lo_satker --
			Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,444,893,282	3,145,661,269	3,299,232,013	104.882
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,444,893,282	3,145,661,269	3,299,232,013	104.882
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	6,444,893,282	3,145,661,269	3,299,232,013	104.882
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	1,117,222,806	(1,117,222,806)	(100)
Beban Persediaan	112,971,600	98,596,700	14,374,900	14.579
Beban Barang dan Jasa	769,297,253	692,384,391	76,912,862	11.108
Beban Pemeliharaan	158,720,664	197,812,161	(39,091,497)	(19.762)
Beban Perjalanan Dinas	406,634,329	452,222,862	(45,588,533)	(10.081)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 017	KANWIL XVII DJKN JAYAPURA	Tanggal : 23/01/22 9:16 PM
SATUAN KERJA	: 538129	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	Halaman : 2
JENIS SATUAN KERJA	: KD	JAYAPURA	Prg ID : lap_lo_satker --
			Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	335,891,359	344,533,240	(8,641,881)	(2.508)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,783,515,205	2,902,772,160	(1,119,256,955)	(38.558)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	4,661,378,077	242,889,109	4,418,488,968	1,819.138
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(130,142,100)	0	(130,142,100)	()
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10,577,900	0	10,577,900	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	140,720,000	0	140,720,000	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(994,800)	994,800	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	475,400	(475,400)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,470,200	(1,470,200)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(130,142,100)	(994,800)	(129,147,300)	12,982.238
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	4,531,235,977	241,894,309	4,289,341,668	1,773.23
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	4,531,235,977	241,894,309	4,289,341,668	1,773.23

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI	: 2500	PAPUA
JENIS SATUAN KERJA	: KD	
SATUAN KERJA	: 538129	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 23/01/22 9:16 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,742,963,656	5,500,206,495	242,757,161	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	4,531,235,977	241,894,309	4,289,341,668	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(4,621,341,936)	862,852	(4,622,204,788)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(90,105,959)	242,757,161	(332,863,120)	-
EKUITAS AKHIR	5,652,857,697	5,742,963,656	(90,105,959)	-